DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2024—2025
KAMIS, 24 JULI 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI; dan**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025.

Pada kesempatan pertama, izinkanlah atas nama pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di di tanah air.

Musibah di Selat Bali, hendaknya menjadikan kita mawas diri dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Faktor cuaca memang tidak dapat dihindari, namun mitigasi dan antisipasi risiko tetap penting dan selalu harus ditingkatkan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia.

Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif;

Hasil Pembangunan baru dapat dirasakan, seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang; oleh karena itu kebijakan negara yang dibuat saat ini harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampak kemajuan dan resiko yang dihadapi di masa depan; sehingga kebijakan negara yang berada pada situasi kepentingan saat ini tidak akan menghasilkan pembangunan yang menjadi beban di masa yang akan datang.

Oleh karena itu DPR RI bersama Pemerintah, dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang seperti dalam Politik Hukum, Politik Pertahanan, Politik Pembangunan, Politik Anggaran, dan lain sebagainya, harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat: kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Undang Undang tentang Kabupaten/Kota dan akan terus melanjutkan pembahasan terhadap 21 (dua puluh satu) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.

DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan

pembentukan undang-undang, sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Pada masa persidangan ini juga, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan mengenai Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025—2029 yang akan memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat lima tahun ke depan untuk mewujudkan DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.

DPR RI bersama Pemerintah telah melaksanakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026, sekaligus membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. DPR RI telah menyepakati kebijakan fiskal Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai pijakan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025—2029. DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Alat Kelengkapan Dewan bersama mitra kerja Pemerintah telah membahas kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, Rencana Kerja Pemerintah, Program dan pagu indikatif di kementerian dan lembaga, serta kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

Seluruh kesepakatan yang dicapai pada pembahasan pendahulan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pada masa sidang ini, DPR RI bersama Pemerintah, juga telah membahas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan Semester I APBN Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah harus dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, berdaya guna, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

DPR RI mendukung penguatan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan diseluruh daerah, serta program-program prioritas strategis pemerintah lainnya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan berbagai

rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain:

1. evaluasi akses pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);
2. evaluasi penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online;
3. evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025;
4. evaluasi penerapan kebijakan pemungutan pajak penghasilan perdagangan *online*;
5. evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025;
6. evaluasi terhadap keselamatan kerja di perusahaan tambang;
7. pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia;
8. pengawasan terhadap maraknya beras oplosan;
9. pengawasan terhadap penerapan *restorative justice* agar sesuai prinsip keadilan;

10. pengawasan terhadap mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum;
11. penataan ulang dan pengelolaan seluruh pulau di Indonesia;
12. rencana penulisan ulang buku sejarah; dan
13. upaya pemerataan Aparatur Sipil Negara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam masa persidangan ini DPR RI secara resmi juga telah menyetujui penetapan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam kaitannya dengan Pengelolaan Holding Operasional BUMN sebagai mitra Komisi VI; dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Pengelolaan Holding Investasi termasuk penugasan negara untuk memastikan kelancaran distribusi barang/jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga/ekonomi, sebagai Mitra Komisi XI.

Langkah ini sebagai tindak lanjut menjalankan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025 ini DPR RI juga telah melaksanakan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap :

1. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia;
2. Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat; dan
3. Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.

Dalam melaksanakan peran diplomasi parlemen, DPR RI telah menerima kunjungan duta besar dan delegasi dari negara Argentina, Serbia, Ekuador, serta Armenia. Selain itu, Delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke negara Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, dan Yunani.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami sampaikan ucapan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025, DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

- **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 10 Rancangan Undang Undang tentang Kabupaten/Kota :**
  1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
  2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
  3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
  4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
  5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tengah
  6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
  7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
  8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
10. RUU tentang Kota Manado di Sulawesi Utara.

- **Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I:**
  1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (*carry over*);
  3. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (*carry over*);
  4. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*carry over*);
  5. RUU tentang Hukum Acara Perdata (*carry over*);

6. RUU tentang Narkotika dan Psikotopika (*carry over*);
7. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (*carry over*);
8. RUU tentang Perubahaan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*carry over*/RUU Kumulatif Terbuka); dan
9. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimination of the Exclusive Economic Zone Boundary*).

- **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

  Sidang yang dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:

  1. Kunjungan diplomasi delegasi ke Republik Rakyat Tiongkok (9—15 Juni 2025);

2. Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue di Roma, Italia (19—21 Juni 2025);
3. Kunjungan diplomasi delegasi ke Mesir (20—26 Juni 2025);
4. Kunjungan diplomasi delegasi ke Yunani (21—27 Juni 2025);
5. 296th IPU Executive Committee di Olympia, Yunani (29 Juni 2025);
6. Sidang ke-16 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Phnom Pneh, Kerajaan Kamboja (13—17 Juli 2025).
7. Sidang United Nation High Level Political Forum on Sustainable Development di New York, Amerika Serikat (22 Juli 2025)
8. The Sixth World Conference of Speakers of Parliament dan 15th Summit of Women Speakers di Jenewa, Swiss (29—31 Juli 2025).